



PERUBAHAN RELASI KUASA ULAMA DAN SULTAN DI KERAJAAN MATARAM ISLAM 1613-1677

Muhammad Ilham Aziz

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

m.ilham.aziz98@gmail.com

Isna Zakiya Nurul Muftaza

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

muftaza.isna@gmail.com

Abstract

This article discusses changes in the power relations of the ulama and the Sultan in the Islamic Mataram Kingdom. In the early days of the establishment of Mataram Islam, the Ulama had an important political role, namely as religious and political advisers in the kingdom. As time went on, there was a change in power relations between the ulama and the sultan, the ulama no longer had a higher position than the king. Some of the ulema became royal officials and worked under the sultan's authority. Even the honorary titles that were originally only used by the ulema were finally used by the sultans to show the king's power as a political leader as well as a religious leader. The main issues that will be discussed in this study include socio-political conditions in the Islamic Mataram Kingdom, the position and relations of the ulama and the sultan and finally discusses changes in the power relations between the ulama and the sultan. This study was developed using the political history method. The findings of this study are that changes in the relationship between the ulama and the sultan occurred due to efforts to legitimize power by the sultan, the characteristics of the rulers and the VOC's interference in the government in Mataram.

Keywords: *Power relations, Ulama, Sultan, Mataram Islam Kingdom.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perubahan relasi kuasa ulama dan Sultan di Kerajaan Mataram Islam. Pada masa awal berdirinya Mataram Islam ulama telah memiliki peran politik yang cukup penting yaitu sebagai penasehat agama dan politik di kerajaan. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan relasi kuasa antara ulama dan sultan, ulama tidak lagi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari raja. Beberapa ulama menjadi pejabat kerajaan dan bekerja di bawah kekuasaan sultan bahkan gelar-gelar kehormatan yang semula hanya digunakan oleh ulama akhirnya digunakan juga oleh para sultan guna menunjukkan kekuasaan raja sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian meliputi kondisi sosial-politik di Kerajaan Mataram Islam, Kedudukan dan relasi ulama dengan sultan dan terakhir membahas tentang perubahan relasi kuasa antara ulama dan sultan. Studi ini dikembangkan dengan metode sejarah politik. Adapun temuan dari kajian ini adalah perubahan relasi kuasa ulama dan sultan terjadi karena adanya upaya legitimasi kekuasaan oleh sultan, karakteristik dari penguasa dan campur tangan VOC dalam pemerintahan di Mataram.

Kata Kunci: *Relasi Kuasa, Ulama, Sultan, Kerajaan Mataram Islam.*

PENDAHULUAN

Sejak Mataram Islam belum menjadi kerajaan yang besar di Jawa sudah terjalannya relasi antara ulama dan Sultan di Kerajaan Mataram Islam. Relasi ini dapat terlihat dari Ki Ageng Pemanahan yang menjadi pembabat tanah Mataram merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Secara tidak langsung dalam pendirian kerajaan Mataram Islam, Sunan Kalijaga memiliki kontribusi karena Sunan Kalijaga ikut serta dalam membantu Ki Ageng Pemanahan mengambil hak tanah Mentaok (Mataram) dari Sultan Hadiwijaya yang saat itu menjabat sebagai raja Pajang.¹ Pada Akhir abad ke-16, wilayah kekuasaan Mataram masih terbatas dan berada dibawah dominasi Kerajaan Pajang. Panembahan Senopati secara perlahan melakukan upaya perluasan wilayah-wilayah lain di Jawa².

¹ Peri Mardiyono, *Tuah Bumi Mataram: Dari Panembahan Senopati Hingga Amangkurat II*. (Yogyakarta: : Araska, 2020), 5.

² Abdul Hadi, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid I* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), 190.

Setelah Kerajaan Mataram Islam terbentuk, sultan menjadikan wali atau ulama sebagai penasehat hukum dan pembimbing spiritual di kerajaan. Ulama memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga semua nasihat dan restu dari para wali ataupun ulama sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Kerajaan Mataram Islam.³ Kontribusi para wali dan ulama tidak terbatas pada bidang politik saja namun juga dalam bidang sosial–budaya, misalnya Sunan Kalijaga yang menjadi pencipta upacara slametan, pertunjukan wayang Jawa, dan beberapa upacara seremonial di Kerajaan Demak dan Mataram Islam.⁴

Pola hubungan antara ulama dan Sultan di Kerajaan Mataram Islam terlihat dari kehidupan spiritual dari sultan. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik keberagamaan pemimpin Mataram Islam mulai dari Ki Ageng Pemanahan hingga Sultan Agung. Bagi pemimpin yang memiliki ketaatan beribadah cenderung memiliki relasi yang harmonis dengan para ulama yang hidup di masa kepemimpinan sultan tersebut.⁵ Meskipun Sultan Agung berhasil menaklukan wilayah Giri tetapi Sultan Agung tetap menghormati Sunan Giri sebagai ulama, raja ulama dari Giri tersebut dibawa ke Mataram dan dihormati disana sehingga relasi antara sultan dan ulama tetap baik. Namun berbeda dengan Amangkurat, pengganti dari Sultan Agung. Amangkurat I dikenal sebagai pribadi yang memiliki karakteristik keberagamaannya kurang sejalan dengan agama Islam dan tradisi kerajaan Mataram Islam maka relasinya dengan ulama juga kurang baik bahkan Amangkurat beranggapan bahwa ulama menjadi sosok dibalik aksi-aksi pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahannya.⁶

Dalam hubungan politik dengan Belanda Sultan Agung dan Amangkurat I memiliki perbedaan pandangan. Sultan Agung merupakan sosok yang anti Belanda sedangkan Amangkurat I pro Belanda. Sejak Amangkurat I naik tahta terjadi perubahan politik dalam negeri. Konflik Sultan dan Belanda yang terjadi selama pemerintahan Sultan Agung kini berubah seratus delapan puluh derajat. Amangkurat

³Rizal Zamzami, “Sejarah Agama Islam Di Kerajaan Mataram Pada Masa Panembahan Senapati 1584-1601,” *JUSPI* 2, no. 2 (2018): 155.

⁴Mark R. Woodrad, *Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 145.

⁵Sudjak, *Serat Sultan Agung : Melacak Jejak Islam Nusantara* (Yogyakarta: Bildung, 2016), 53.

⁶Ahwan Mukarrom, *Sejarah Islam Indonesia I* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 166.

I bersedia melakukan kompromi dengan Belanda yang diawali dengan tukar menukar tawanan.⁷

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk mempelajari secara lebih dalam tentang dinamika kehidupan sosial-politik di Kerajaan Mataram Islam yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh relasi pemimpin kerajaan yaitu sultan, ulama dan pemerintah kolonial Belanda. Sejak awal berdirinya kerajaan Mataram Islam sudah ada peran dari ulama bahkan ulama juga menjabat sebagai penasihat kerajaan, kemudian pada masa Amangkurat I muncul hegemoni politik kolonial Belanda yang memengaruhi kehidupan politik di Mataram Islam. Penelitian ini diawali dengan pembahasan tentang kondisi sosial-politik secara umum di Mataram dari masa kepemimpinan Sultan Agung sampai masa Amangkurat I dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kedudukan ulama serta relasi ulama dan sultan di Kerajaan Mataram Islam kemudian pembahasan diarahkan pada pengungkapan mengapa terjadi perubahan relasi kuasa antara ulama dan sultan di Kerajaan Mataram Islam.

Kajian yang sesuai dengan tema tulisan ini yaitu karya Ahmad Adaby Darban yang mengkaji tentang kehidupan ulama di masa awal pengembangan Islam di Jawa. Penelitian ini menggambarkan kehidupan ulama di Mataram serta peranannya dalam bidang politik sehingga penelitian ini bisa membantu menganalisis relasi antara ulama dan sultan di Mataram Islam. Namun kajian ini belum menjelaskan secara terperinci terkait perubahan relasi kuasa yang terjadi antara ulama dan Sultan di Mataram Islam khususnya yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung dan Amangkurat I. Sedangkan tulisan ini menjadi pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya, terutama dalam perubahan relasi kuasa ulama dan Sultan di Mataram Islam.

Penelitian ini merupakan bagian dari sejarah politik yang berfokus pada perubahan relasi kuasa antara ulama dan sultan di Mataram Islam. Sehubungan dengan kajian sejarah politik tersebut maka pendekatan yang relevan digunakan adalah pendekatan politik. Dengan memakai pendekatan politik maka bisa terungkap pola-pola distribusi kekuasaan. Dalam pola distribusi tersebut bisa diketahui hakikat dari sistem politik, pola-pola dari kelakuan individu atau kelompok yang dapat

⁷ Mukarrom, 169.

mempermudah dalam menjelaskan fungsi suatu sistem, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial politik.⁸

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*Library Research*) sehingga untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber baik sumber primer atau sekunder digunakan buku, dan jurnal yang sesuai dengan tema penelitian. Untuk metode penelitian menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun langkah penelitian ini meliputi empat tahap, *Pertama*, heuristik yaitu langkah untuk mencari data terkait peristiwa yang diteliti. *Kedua*, Verifikasi atau kritik sumber yaitu proses untuk menguji serta menganalisis data penelitain yang telah ditemukan. *Ketiga*, tahap interpretasi yaitu proses penafsiran fakta-fakta yang telah ditemukan dari beberapa fakta tersebut bisa diketahui rangkaian peristiwa. *Keempat*, historiografi merupakan tahap penulisan sebuah karya sejarah.⁹

PEMBAHASAN

Kondisi Politik Kerajaan Mataram Islam Masa Kepemimpinan Sultan Agung dan Amangkurat I

Pada tahun 1613 Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma. Dalam proses pengangkatan Sultan Agung menjadi raja Mataram Islam menggantikan ayahnya Hanyakrawati sempat menimbulkan sedikit polemik karena Sultan Agung dilahirkan oleh permaisuri kedua sedangkan permaisuri pertama juga memiliki putra bernama Pangeran Martapura. Pada umumnya sebuah kerajaan biasanya mengangkat putra mahkota dari permaisuri pertama untuk menjadi raja menggantikan ayahnya namun tradisi ini tidak dijalankan oleh Hanyakrawati. Pengangkatan Sultan Agung menjadi sultan Mataram Islam sudah menjadi wasiat dari Hanyakrawati sebelum ia meninggal.¹⁰

Di bawah kekuasaan Sultan Agung Mataram mencapai puncak kejayaan. Sultan Agung merupakan sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana. Karakter dan kepribadian tersebut diwarisi dari kakeknya Panembahan Senopati. Dalam masa

⁸ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 18.

⁹ Abdurrahman, 19.

¹⁰ Serat Sultan Agung: *Melacak Jejak Islam Nusantara*, 6.

pemerintahannya Sultan Agung menerapkan politik ekspansi meneruskan usaha perluasan wilayah dari kakeknya sehingga wilayah kekuasaannya sangat luas meliputi hampir seluruh pulau Jawa. Daerah yang selama ini sulit ditaklukkan seperti Surabaya dan Blambangan berhasil dikuasai pula oleh Sultan Agung. Berbagai kemajuan baik dalam bidang politik, ekonomi, agama dan kebudayaan terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Agung.¹¹

Letak geografis Mataram yang ada di pedalaman menjadikan kerajaan ini sebagai daerah agraris didukung pula dengan tanah yang subur. Mataram menjadi daerah terbesar dalam ekspor beras.¹² Pembangunan fisik menjadi prioritas pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pembangunan tersebut diwujudkan dengan pembukaan sawah baru, bendungan dan jaringan irigasi. Sultan memindahkan banyak para petani ke daerah Karawang yang subur atas dasar kehidupan agraris inilah disusunlah masyarakat yang bersifat feodal. Selain melakukan pembangunan fisik Sultan Agung juga mengharuskan rakyatnya mengikuti wajib militer. Setiap desa yang berada di bawah kekuasaan Mataram setidaknya memiliki seratus prajurit dengan kepala desa sebagai komandonya. Setiap kepala pemerintahan baik dalam tingkat pusat ataupun daerah diharuskan mempunyai kemampuan sebagai panglima perang.¹³

Konflik dan kontak senjata antara Mataram Islam dengan VOC banyak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung. Saat penobatan Sultan Agung, pihak Belanda mengutus orang untuk memberikan ucapan selamat namun Sultan Agung menolak utusan dari Belanda tersebut karena sang Sultan menganggap bahwa VOC ingin menguasai Jawa. Berbagai perlawanan terhadap VOC selalu dilakukan oleh Sultan Agung. Tahun 1628 sultan Agung memberangkatkan pasukan Jawa untuk melawan VOC namun perlawanan itu gagal. Sultan Agung tidak patah semangat tahun 1629 sultan mencoba lagi untuk melakukan serangan kepada VOC tetapi serangan ini menjadi malapetaka bagi pasukan Mataram Islam karena VOC sudah mengetahui rencana penyerangan tersebut dan VOC telah menghancurkan gudang-gudang beras

¹¹ Muhammad Ilham Aziz dan Dudung Abdurrahman, "Sufisme Jawa Dalam Serat Sastra Gending Sultan Agung Mataram," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 7, no. 1 (2022): 42.

¹² Iriyanti Agustina, *Kebudayaan dan Kerajaan Islam di Indonesia* (Pontianak: Derwati Press, 2018), 54.

¹³ Peri Mardiyono, *Tuah Bumi Mataram: Dari Panembahan Senopati Hingga Amangkurat II* (Yogyakarta: Araska, 2020), 178.

dan perahu yang sudah disiapkan oleh Sultan Agung. Pasokan logistik yang kurang menyebabkan pasukan Mataram Islam banyak yang terserang penyakit dan menderita kelaparan sehingga pasukan bercerai-berai. Akhirnya serangan ini mengalami kegagalan lagi. Meskipun beberapa kali mengalami kegagalan Sultan Agung pantang menyerah. Pertempuran antara Sultan Agung dan VOC tetap berlangsung namun dalam skala yang lebih kecil. Perlawanan Sultan Agung dengan VOC terus berlanjut hingga Sultan Agung meninggal dunia.¹⁴

Setelah Sultan Agung yaitu sosok yang sangat menentang VOC wafat, Kemudian Mataram Islam dipimpin oleh penguasa yang pro dengan VOC yaitu Susuhunan Amangkurat I. Ketika Mataram dipimpin oleh Amangkurat I kehidupan politik di Mataram selalu diwarnai dengan berbagai konflik. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Amangkurat I sering mendapat pertentangan dari rakyat namun sang penguasa tetap bersikeras melaksanakan kebijakan tersebut sehingga muncullah berbagai pemberontakan.¹⁵ Pemimpin Mataram Islam yang berkuasa setelah Sultan Agung semakin bergantung dengan kekuatan VOC karena VOC mampu menyuplai senjata dan kekuatan militer untuk melemahkan pemberontakan yang muncul di Mataram Islam. Sebagai imbalan untuk bantuannya, VOC meminta sebagian tanah kepada penguasa Mataram.¹⁶ Pada masa Amangkurat I wilayah kekuasaan Mataram sangat luas namun seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit berkurang sedangkan kekuasaan VOC semakin luas pengaruhnya hingga ke sistem intern kerajaan. Mulai dari sistem pergantian pemimpin, pengangkatan pejabat tinggi kerajaan, pelaksanaan birokrasi dan semuanya tidak lepas dari pengawasan pemerintah Belanda.¹⁷

Diakhir Pemerintahan Amangkurat I, Kerajaan Mataram Islam mengalami berbagai gejolak politik baik masalah politik secara lokal maupun global. Misalnya dalam urusan politik global, awalnya Amangkurat I telah mengklaim beberapa kekuasaan secara sepihak di wilayah Palembang, Jambi, Kalimantan, Banten, Batavia dan Blambangan. Klaim sepihak atas beberapa wilayah tersebut bukanlah hasil

¹⁴ M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Yogyakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 180.

¹⁵ Harun Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1994), 30.

¹⁶ Koentjoroningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 155.

¹⁷ Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, 31.

ekspansi dari Amangkurat I sendiri namun sisa dari masa kejayaan Sultan Agung namun di akhir kekuasaan Amangkurat I wilayah kekuasaan Mataram yang berlokasi diluar Jawa sudah habis tidak bersisa. Selain politik global yang hancur konflik politik juga datang dari kekuatan lokal di Jawa. Berbagai gejolak politik ini menjadikan kekuasaan Amangkurat menjadi semakin lemah.¹⁸

KEDUDUKAN ULAMA DAN RELASI ULAMA DENGAN SULTAN DI KERAJAAN MATARAM ISLAM

A. Kedudukan Ulama di Mataram Islam

Semenjak berdirinya kerajaan Islam di Jawa, para ulama memiliki peran politik dan keagamaan. Saat berdirinya Kerajaan Demak, muncul beberapa tokoh agama Islam yang terkenal dengan sebutan walisanga. Diantara sembilan wali tersebut, ada beberapa wali yang menjabat sebagai penasihat kerajaan Demak yaitu Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Selain sebagai penasihat kerajaan, para wali juga berhak untuk mengesahkan serta memberi gelar kepada raja Islam di Jawa. Bahkan para wali memiliki wewenang untuk mencabut kedudukan sultan jika sang sultan menyimpang dari ajaran agama dan menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh wali.¹⁹

Para wali dan ulama mendapatkan penghormatan yang tinggi di masyarakat, mereka memiliki pengaruh yang cukup luas. Selain sebagai pemimpin agama, wali juga menjadi penguasa di wilayahnya sendiri. Tidaklah mengejutkan jika Sunan Giri juga memiliki gelar Prabu Setmana atau Sunan Bonang yang memiliki gelar prabu Anyakarakusuma, bahkan dalam Babad tanah jawi Sunan giri diberi gelar Raja Pandhita.²⁰

Di Kerajaan Mataram Islam para wali juga memegang peran politik yang penting. Pada masa-masa awal berdirinya Mataram Islam Sunan Kalijaga yang terkenal sebagai penghulu di Masjid Demak dijadikan pembimbing spiritual oleh sultan bahkan Penembahan Senopati menjadikan Sunan Kalijaga sebagai pembimbing

¹⁸ Hery Priswanto and Alifah, *A Photobook Plered : Dinamika Ibukota Mataram Islam Pasca Kotagede* (Yogyakarta: Balai Arkeologi DIY, 2019), 36.

¹⁹ Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 218.

²⁰ Maharsi, "Sultan Agung: Simbol Kejayaan Kasultanan Islam Jawa," *Jurnal Riset Daerah* XV, no. II (2016): 2478.

dibidang politik.²¹ Hal ini tidak terlepas dari peran Sunan Kalijaga saat Senopati berusaha memerdekakan tanah warisnya dari kekuasaan Pajang. Langkah awal untuk yang dilakukan untuk memerdekakan yaitu pembangunan tembok yang mengitari istananya. Pembangunan tembok ini dilakukan atas nasihat dan petunjuk dari Sunan Kalijaga.²² Pada masa Panembahan Senopati Islam dijadikan sebagai agama resmi Kerajaan Mataram, dan kedudukan seorang ulama atau wali lebih tinggi dari seorang raja.²³ Peran politik ulama tetap berlanjut hingga masa kepemimpinan Sultan Agung, ulama menjabat sebagai Dewan parampa (Penasihat Tinggi Kerajaan). Selain sebagai dewan parampa, dalam struktur pemerintahan Sultan Agung membentuk Lembaga Mahkamah Agama Islam. Lembaga ini berisikan para ulama yang menjadi abdi dalem (pegawai keraton) dalam bidang keagamaan dan dipimpin oleh seorang penghulu.²⁴

Relasi antara sultan dan para ulama di Jawa sangat harmonis terutama pada masa permulaan tumbuhnya Kerajaan Islam di Jawa mulai dari kerajaan Demak, Pajang dan di permulaan berdirinya Mataram Islam. Pengaruh ulama yang begitu besar dalam kehidupan politik di kerajaan Islam menyebabkan para pemimpin selalu memerlukan restu serta bantuan dari para ulama. Para raja sangat menghormati para wali, hal ini tercermin dalam sikap dan penggunaan tutur kata. Saat berbicara dengan ulama atau wali, raja menggunakan basa krama sedangkan sang wali menggunakan basa ngoko.²⁵ Meskipun pada masa Sultan Agung terjadi penaklukan di beberapa wilayah seperti Lasem, Pasuruan, Tuban dan Giri yang menjadi basis kekuasaan ulama pesisir yang menyebabkan kekuasaan di wilayah tersebut runtuh namun secara personal relasi antara sultan dan ulama tetap harmonis.²⁶

²¹ A. Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 190.

²² H. J. De Graff, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa : Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram* (Jakarta: Grafitipers, 1986), 283.

²³ Muhammad Ilham Aziz, "Sufisme Sultan Agung dan Keberagaman Masyarakat Mataram Abad XVII" (Yogyakarta, Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), 39.

²⁴ Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam*, 219

²⁵ Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), 122.

²⁶ Hadi, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid I*, 206.

B. Tipologi Ulama Di Kerajaan Mataram Islam

Secara umum ada tiga tipe ulama yang hidup pada masa Kerajaan Mataram Islam. Pertama yaitu ulama yang berdarah bangsawan, ulama tipe ini biasanya muncul dari faktor perkawinan. Hal ini bisa terjadinya karena para bangsawan menikahkan putranya dengan ulama atau keluarga ulama.²⁷ Raden Kajoran merupakan salah satu ulama tipe bangsawan. Pangeran Raden Ing Kajoran menikah dengan Raden Ayu Wangsa Cipta yang merupakan putri dari Penembahan Senopati. Melalui perkawinan ini terlahirlah Pangeran Kajoran Ambalik atau dikenal dengan Panembahan Rama yang dalam perkembangannya menjadi lawan untuk Sunan Amangkurat I.

Kedua adalah tipe ulama yang memiliki jabatan birokrasi di Kerajaan Mataram Islam. Ulama birokrasi memiliki tugas untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang keagamaan di wilayah Kerajaan Mataram Islam. Tipe ketiga adalah ulama yang memilih hidup di pedesaan dengan mengelola pesantren atau suraunya. Ulama tipe ini sengaja menjauh dari keramaian kehidupan Kerajaan Mataram Islam dan mereka melakukan dakwah atas kemauannya sendiri sehingga ulama tipe ini merupakan ulama independen dan kapasitas keilmuannya tidak kalah dengan ulama-ulama Kerajaan Mataram Islam. Dari ketiga tipe ulama yang telah disebutkan ternyata hanya ulama tipe kedua yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap sultan meskipun tidak jarang sultan yang memimpin melakukan penyimpangan kaidah ataupun norma agama, mereka tetap menunjukkan loyalitasnya sebagai seorang pegawai kerajaan. Berbeda halnya dengan ulama tipe pertama dan ketiga, mereka cenderung berani menentang kebijakan sultan apabila melenceng dari norma-norma agama.²⁸

C. Perubahan Relasi Ulama dan Sultan

Perubahan relasi kuasa antara sultan dan ulama mulai terlihat sejak Sultan Agung naik takhta. Sultan Agung berhasil menurunkan kedudukan politik ulama dalam kerajaan Mataram Islam. Sebelum masa kepemimpinan Sultan Agung kedudukan

²⁷ Ahmad Adaby Darban, "Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Humaniora* 16, no. 1 (2004): 31.

²⁸ Mukarrom, *Sejarah Islam Indonesia I*, 123.

ulama lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan raja.²⁹ Misalnya dalam penggunaan gelar yang berubah pada pemimpin kerajaan Mataram Islam juga menandakan adanya perubahan relasi kuasa antara ulama dan sultan. Untuk melegitimasi kekuasaan sultan maka digunakan gelar Sunan atau Susuhunan. Gelar tersebut mengikuti sebutan para wali yang menyebarkan Islam di Jawa karena saat itu wali memang memiliki kedudukan dan penghormatan yang tinggi di masyarakat. Namun gelar Susuhunan belum juga bisa memuaskannya sang sultan karena Sultan Agung tidak ingin ada yang bisa menyamai kekuasaannya.³⁰ Kemudian Sultan menggunakan gelar Sultan Agung Amirul Mu'minin Sayidin Panatagama. Istilah panatagama menggambarkan bahwa sultan sebagai pelindung sekaligus pengatur agama. Sultan menghendaki dirinya sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama.³¹

Sultan Agung memiliki ambisi yang besar untuk menguasai Jawa serta legitimasi secara internasional terutama di dunia Islam. Ia tidak mau dikalahkan oleh penguasa Banten yang telah lebih dahulu memiliki gelar sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir. Sultan Agung segera mengirim utusan ke Makkah guna mendapatkan legitimasi kekuasaan. Akhirnya Sultan Agung memperoleh gelar "Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami".³²

Kerajaan Mataram Islam menekankan pada kekuasaan sentralistik atau disebut juga dengan mono-kraton sehingga para ulama yang memiliki kekuasaan di beberapa wilayah pantai utara Jawa dilihat sebagai ancaman bagi sistem kekuasaan sekaligus sebagai sasaran kebijakan politik sentralistik. Sejak tahun 1620-an Sultan Agung mulai menaklukkan kota-kota pantai yang dipimpin oleh raja ulama.³³ Salah satu upaya untuk menundukkan kekuasaan raja ulama maka Sultan Agung melakukan ekspansi ke wilayah Gresik, Giri dan Surabaya dengan dalih untuk mempersatukan Jawa. Dengan jatuhnya Giri yaitu wilayah kekuasaan Sunan Giri, maka wilayah ini berada dalam penguasaan Mataram Islam sehingga berakhir riwayat kedaulatan politik

²⁹ Soedjipto Abimanyu, *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram: Seluk Beluk Berdirinya Kesultanan Yogyakarta Dan Kesunanan Surakarta* (Yogyakarta: Dinapress, 2015), 77.

³⁰ Maharsi, *Sultan Agung*, 2478.

³¹ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3S, 1996), 141.

³² Mukarrom, *Sejarah Islam Indonesia I*, 166.

³³ Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, 141.

ulama Giri atas kerajaan Islam dan berpindah dibawah kekuasaan Mataram Islam.³⁴ Meskipun wilayah kekuasaan Sunan Giri berada dibawah Mataram Islam namun diluar urusan pemerintahan hubungan secara personal antara Sultan Agung dan para ulama masih harmonis.³⁵ Sultan masih memiliki sikap apresiatip yang tinggi terhadap ulama. Hal ini tidak terlepas dari religiusitas Sultan Agung yang tinggi pula sehingga Sultan tetap memberikan penghormatan pada ulama.³⁶

Setelah Sultan Agung meninggal pemerintahan dipegang oleh putranya, Amangkurat I. Jauh sebelum Amangkurat I naik tahta menggantikan Sultan Agung, Amangkurat I sudah terbiasa hidup sebagai bangsawan istana sehingga sering bergaul dengan Belanda. Pergaulan dengan Belanda memengaruhi tabiat Amangkurat I yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Reputasi moralitasnya sangat berbeda dengan orang tuanya terutama dalam hubungannya dengan perempuan. Hal ini terlihat dari peristiwa dimana Amangkurat I pernah membawa lari isteri Tumenggung Wiraguna. Kemudian Amnagkurat I juga pernah melarikan istri Ki Dalem saat perempuan tersebut masih dalam keadaan mengandung. Masih seputar kasus tentang perempuan, Amangkurat I dan putera mahkotanya pernah terlibat persengketaan perempuan, dimana putera Amngkurat dianggap telah melarikan Roro Oyi, perempuan disukai oleh Amngkurat I.³⁷

Pada masa Amangkurat I terjadi perubahan relasi yang cukup signifikan antara sultan dan ulama baik dalam hubungan pemerintahan atau hubungan personal. Amangkurat I membatasi perkembangan Islam dan mengurangi peran ulama dalam pemerintahan di Mataram.³⁸ Pemerintahan Aangkurat I dipenuhi dengan berbagai konflik. Dalam berbagai konflik yang tampil sebagai lawan adalah orang-orang yang mendapat dukungan dari ulama yang prihatin dengan kondisi keagamaan di Mataram Islam. Amangkurat I menganggap bahwa ulama dan para santri berbahaya bagi kelangsungan tahtanya bahkan Amangkurat I merasa tidak memerlukan gelar sultan

³⁴ Adaby Darban, "Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah," 30.

³⁵ Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa : Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*, 97.

³⁶ Mukarrom, *Sejarah Islam Indonesia I*, 167.

³⁷ *Ibid.*, 168.

³⁸ *Ibid.*, 170.

yang identik dengan sebutan bagi raja yang beragama Islam sebagai upaya untuk melegitimasi kekuasaannya.³⁹

Sejak masa awal kepemimpinan, Amangkurat I telah membuat perjanjian dengan VOC. Dalam perjanjian tersebut ada salah satu pasal yang mengatur terkait kesediaan Belanda dalam pengaturan perjalanan ulama di Mataram. Dari perjanjian diatas menggambarkan bahwa secara tidak langsung kehidupan politik di Mataram Islam mendapatkan pengaruh dari Belanda bahkan terkait dengan kehidupan ulama di masa tersebut.⁴⁰ Di Mataram Islam peran ulama semakin tegeser bahkan dalam laporan Ricklof Van Goen pada masa Amangkurat I terjadi pembantaian massal terhadap ulama. Sekitar 5000 hingga 6000 ulama dan sanak keluarganya di bunuh di alun-alun Plered. Semenjak peristiwa ini peran ulama dalam birokrasi pemerintahan semakin berkurang.⁴¹

Hubungan yang kurang harmonis antara ulama dan Amangkurat I menyebabkan terjadinya pemberontakan yang didukung oleh para ulama dan tokoh spiritual. Langkah awal yang dilakukan Amangkurat I untuk membendung perlawanan ulama yaitu dengan menumpas pendukung Pangeran Alit yang terdiri dari para santri, ulama desa perdikan. Dari peristiwa pemberontakan yang dilakukan Pangeran Alit ini Amangkurat semakin yakin kaum santri membahayakan kedudukannya. Pemberontakan terhadap Amangkurat terus berlanjut. Kali ini pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Kajoran tokoh spiritual masa itu.⁴² Dalam melakukan pemberontakan Raden Kajoran bersekutu dengan Pangeran Trunojoyo. Berbagai pemberontakan yang dilancarkan oleh berbagai pihak menyebabkan kekuasaan di Mataram Islam menjadi lemah. Amnagkurat I tidak hanya mengakhiri kekuasaan politik para ulama. Ia mengawali terpisahnya kekuasaan politik dan agama dalam kehidupan kerajaan.⁴³

³⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 215.

⁴⁰ Tim Pemerintahan DIY, *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Biro Tata Pemerintah Setda DIY, 2017), 36.

⁴¹ Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, 219.

⁴² Sarkawi B. Husain, *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 39.

⁴³ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Pekanbaru: CV. Nuansa Jaya Mandiri, 2014), 67.



PENUTUP

Perubahan relasi kuasa antara ulama dan sultan di Mataram Islam sudah terlihat sejak masa pemerintahan Sultan Agung, sang sultan mulai menggunakan gelar-gelar yang semula hanya dipakai oleh para ulama atau wali untuk melegitimasi kekuasaannya. Politik ekspansi juga dilakukan oleh Sultan Agung untuk meruntuhkan pemerintahan raja ulama sehingga pemerintahan raja ulama bisa tunduk dibawah kekuasaan Mataram Islam. Berbeda dengan sang ayah yang berusaha mengurangi pengaruh ulama dalam bidang politik melalui perubahan gelar dan politik ekspansi. Amangkurat I memilih untuk bersekutu dengan Belanda dalam mengatur kehidupan ulama serta penghapusan ulama di Mataram. Pada masa Amangkurat I terjadi de-islamisasi. Beberapa ulama dibunuh, kehidupan keagamaan merosot dan dekadansi moral terjadi akibat campur tangan dari budaya asing yang dibawa oleh Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1996.
- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Abimanyu, Soedjipto. *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram: Seluk Beluk Berdirinya Kesultanan Yogyakarta Dan Kesunanan Surakarta*. Yogyakarta: Dinapress, 2015.
- Adaby Darban, Ahmad. "Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Humaniora* 16, no. 1 (2004): 31.
- Agustina, Iriyanti. *Kebudayaan dan Kerajaan Islam Di Indonesia*. Pontianak: Derwati Press, 2018.
- B. Husain, Sarkawi. *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- C. Ricklef, M. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Yogyakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Daliman, A. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Hadi, dkk, Abdul. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid I*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Helmiati. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: CV. Nuansa Jaya Mandiri, 2014.
- Huda, Nor. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

- Ilham Aziz, Muhammad. "Sufisme Sultan Agung dan Keberagaman Masyarakat Mataram Abad XVII." Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Ilham Aziz, Muhammad, dan Dudung Abdurrahman. "Sufisme Jawa Dalam Serat Sastra Gending Sultan Agung Mataram." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 7, no. 1 (2022): 42.
- J. De Graff, H. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa : Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram*. Jakarta: Grafitipers, 1986.
- Koentjoroningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Maharsi. "Sultan Agung: Simbol Kejayaan Kasultanan Islam Jawa." *Jurnal Riset Daerah XV*, no. II (2016): 2478.
- Mardiyono, Peri. *Tuah Bumi Mataram: Dari Panembahan Senopati Hingga Amangkurat II*. Yogyakarta: : Araska, 2020.
- . *Tuah Bumi Mataram: Dari Panembahan Senopati Hingga Amangkurat II*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Moedjanto. *Konsep Kekuasaan Jawa : Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Mukarrom, Ahwan. *Sejarah Islam Indonesia I*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Pemerintahan DIY, Tim. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Biro Tata Pemerintah Setda DIY, 2017.
- Priswanto, Hery, and Alifah. *A Photobook Plered : Dinamika Ibukota Mataram Islam Pasca Kotagede*. Yogyakarta: Balai Arkeologi DIY, 2019.
- R. Woodrad, Mark. *Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Sudjak. *Serat Sultan Agung : Melacak Jejak Islam Nusantara*. Yogyakarta: Bildung, 2016.
- Yahya, Harun. *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI Dan XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1994.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Zamzami, Rizal. "Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram Pada Masa Panembahan Senapati 1584-1601." *JUSPI* 2, no. 2 (2018): 155.